Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 46915-46924

Dinamika Partisipasi Politik Generasi Muda Indonesia: Dari Bilik Suara hingga Ruang Digital

Pande Putu Dicky Sumadiartana[1], I Nyoman Subanda[2]

[1,2]Universitas Pendidikan Nasional

pandeberjaya@gmail.com, **nyomansubanda@undiknas.ac.id**

Published: Agustus , 2026

ABSTRAK

Generasi muda kini menjadi kekuatan demografis terbesar dalam peta pemilih Indonesia, sekaligus kelompok yang hidupnya paling lekat dengan media sosial. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana partisipasi politik generasi muda—khususnya Generasi Z dan Milenial—bertransformasi seiring meluasnya penggunaan platform digital seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Kajian disusun dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis penelaahan data sekunder dari lembaga resmi dan lembaga riset kredibel, yang kemudian dianalisis melalui kerangka teori Network Society, Public Sphere, dan Uses and Gratifications. Hasil kajian menunjukkan bahwa dominasi numerik generasi muda dalam struktur pemilih nasional maupun daerah berkelindan dengan tingginya tingkat penetrasi internet dan intensitas penggunaan media sosial pada kelompok usia ini, sehingga menjadikan ruang digital sebagai arena utama sosialisasi politik yang menggeser peran ruang publik konvensional. Instagram teridentifikasi sebagai kanal paling dominan dalam penyebaran informasi politik di kalangan anak muda, mengungguli YouTube, Facebook, TikTok, dan X. Transformasi ini membuka peluang perluasan partisipasi politik yang lebih inklusif dan personal, namun juga memunculkan tantangan berupa fragmentasi wacana, kerentanan terhadap misinformasi, dan partisipasi yang cenderung simbolik. Artikel ini menyimpulkan bahwa media sosial telah menggeser locus partisipasi politik generasi muda dari bilik suara konvensional menuju linimasa digital, sehingga menuntut penguatan literasi politik digital sebagai agenda mendesak bagi keberlanjutan demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: partisipasi politik; Generasi Z; media sosial; demokrasi digital

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Struktur demografi pemilih Indonesia mengalami pergeseran fundamental dalam satu dekade terakhir. Data Komisi Pemilihan Umum yang diolah oleh Katadata menunjukkan bahwa pemilih Pemilu 2024 didominasi oleh kelompok Generasi Z dan Milenial, yang secara kumulatif mencapai 56% dari total pemilih nasional (Katadata Media Network, 2024). Dominasi serupa juga tampak pada level kewilayahan; data Open Data Jawa Barat mencatat bahwa Generasi Z dan Milenial menyumbang sekitar 55% suara pada Pemilu 2024 di provinsi tersebut (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2024). Kedua data ini menegaskan bahwa generasi muda bukan lagi sekadar pelengkap dalam kontestasi elektoral, melainkan kelompok penentu arah politik Indonesia baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dominasi numerik ini berlangsung bersamaan dengan transformasi mendalam pada cara generasi muda mengakses informasi dan berinteraksi dengan isu-isu publik. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 mencatat bahwa jumlah pengguna internet Indonesia telah mencapai 221,5 juta jiwa, setara dengan tingkat penetrasi 79,5% dari total populasi, dengan Generasi Z sebagai kelompok pengguna terbesar (34,40%), diikuti oleh Milenial (30,62%) (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa kelompok usia

yang secara elektoral paling dominan juga merupakan kelompok yang paling intensif berada dalam ekosistem digital, sehingga wajar apabila perilaku politik mereka tidak dapat lagi dipahami secara terpisah dari perilaku bermedia sosial mereka.

Pergeseran ini semakin nyata ketika ditelusuri lebih jauh ke platform mana generasi muda mengonsumsi informasi politik. Survei Katadata Insight Center yang dirilis pada Oktober 2023 menemukan bahwa Instagram merupakan platform yang paling banyak digunakan anak muda untuk mengakses informasi politik, dengan proporsi 66,2%, diikuti oleh YouTube (40,8%), Facebook (38,1%), TikTok (33,8%), dan X/Twitter (30,2%) (Katadata Insight Center, 2023). Temuan ini mengonfirmasi bahwa arena utama sosialisasi dan edukasi politik generasi muda saat ini bukan lagi ruang tatap muka konvensional seperti forum warga, media cetak, atau kampanye terbuka, melainkan linimasa (timeline) platform media sosial yang mereka akses setiap hari.

Fenomena ini disebut sebagai transformasi partisipasi politik dari bentuk konvensional menuju bentuk digital. Partisipasi politik konvensional—memilih, menghadiri kampanye, menjadi anggota partai—kini dilengkapi bahkan sebagian tergantikan oleh aktivitas seperti membagikan konten kebijakan publik, mengikuti akun tokoh politik, memberi komentar kritis, hingga terlibat dalam gerakan tagar (Judijanto et al., 2024; Putra et al., 2025). Gerakan digital seperti #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw menjadi bukti nyata bagaimana generasi muda mampu memobilisasi solidaritas kolektif berskala nasional melalui jaringan digital horizontal tanpa bergantung pada struktur partai politik formal (Wahyuningroem et al., 2024). Kapasitas mobilisasi semacam ini turut dijelaskan oleh kajian mengenai aktivisme digital generasi muda Indonesia yang menunjukkan bahwa media sosial kini menjadi instrumen utama gerakan sosial kontemporer (Nugroho, 2025).

Meningkatnya intensitas penggunaan media sosial juga terbukti berkorelasi dengan tingkat partisipasi politik generasi muda. Kajian terhadap mahasiswa pada Pemilu 2024 menemukan bahwa intensitas penggunaan media sosial berpengaruh positif terhadap partisipasi politik mereka (Rohmah & Fatchuriza, 2025), sejalan dengan temuan mengenai pengaruh signifikan intensitas penggunaan platform digital terhadap partisipasi politik digital mahasiswa (Nerista et al., 2025). Pada saat yang sama, penelitian mengenai politik identitas menunjukkan bahwa media sosial turut menjadi ruang pembentukan dan penguatan afiliasi politik generasi muda, yang pada gilirannya memengaruhi pola partisipasi mereka (Harsono, 2023).

Meskipun demikian, transformasi ini tidak berlangsung tanpa konsekuensi. Ruang digital yang menjadi arena utama partisipasi politik generasi muda juga rentan terhadap distorsi wacana, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian mengenai literasi politik generasi muda di era pasca-kebenaran yang menyoroti kerawanan generasi muda terhadap misinformasi politik di media sosial (Yanto & Irmala Sari, 2025). Kekhawatiran serupa turut dikemukakan dalam kajian mengenai peran media sosial terhadap partisipasi politik dan demokrasi di Indonesia, yang menegaskan bahwa perluasan ruang partisipasi digital tidak otomatis diikuti oleh peningkatan kualitas deliberasi publik (Khatimah et al., 2024).

Berdasarkan rangkaian fenomena tersebut, tampak bahwa dominasi demografis generasi muda dalam struktur pemilih Indonesia, tingginya penetrasi internet pada kelompok usia ini, serta pergeseran preferensi platform untuk konsumsi informasi politik merupakan tiga fenomena yang saling terkait dan perlu dibaca secara terintegrasi. Artikel ini disusun untuk mendeskripsikan dan menganalisis keterkaitan ketiga fenomena tersebut secara komprehensif, dengan menempatkan data kependudukan pemilih, data penetrasi digital, dan data preferensi platform politik dalam satu kerangka analisis yang koheren, guna memahami secara lebih utuh bagaimana media sosial mentransformasikan wajah partisipasi politik Generasi Z dan Milenial Indonesia—dari bilik suara konvensional menuju linimasa digital yang mereka huni setiap hari.

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

1. Konsep Partisipasi Politik: dari Bentuk Konvensional Menuju Bentuk Digital

Partisipasi politik secara klasik dipahami sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah, seperti memilih dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, menghadiri kampanye, atau menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat.

Definisi ini menekankan aktivitas yang bersifat formal, episodik, dan terikat pada institusi politik konvensional. Namun, kerangka tersebut dinilai semakin terbatas dalam menjelaskan corak partisipasi generasi muda kontemporer yang tumbuh dalam ekosistem digital (Putra et al., 2025; Universitas Slamet Riyadi & Azizah, 2024).

Partisipasi politik digital memperluas cakupan konsep tersebut dengan memasukkan aktivitas baru yang dimungkinkan oleh teknologi, seperti menandatangani petisi daring, membagikan konten politik, mengikuti akun tokoh atau lembaga publik, memproduksi konten kritik kebijakan, hingga terlibat dalam gerakan tagar (Nerista et al., 2025; Wahyuningroem et al., 2024). Karakteristik utamanya adalah sifatnya yang cair, personal, horizontal, dan tidak selalu memerlukan keanggotaan formal dalam organisasi politik. Pergeseran ini menandai transisi dari partisipasi berbasis kewajiban warga negara (duty-based) menuju partisipasi berbasis aktualisasi diri (self-actualizing), di mana generasi muda berpartisipasi karena relevansi personal dan ekspresi identitas (Amin et al., 2025).

Penting dicatat bahwa transformasi ini tidak menggantikan sepenuhnya bentuk partisipasi konvensional, melainkan menciptakan ekosistem partisipasi berlapis (hybrid) di mana aktivitas daring dan luring saling berkelindan. Data dominasi elektoral generasi muda yang diuraikan pada bagian pendahuluan (Katadata Media Network, 2024; Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2024) menunjukkan bahwa partisipasi konvensional berupa pemberian suara tetap menjadi bentuk partisipasi puncak yang signifikan, namun proses menuju keputusan tersebut kini sangat dimediasi oleh interaksi generasi muda dengan konten politik di media sosial. Dengan demikian, partisipasi politik digital perlu dipahami sebagai perluasan repertoar, bukan pengganti, dari partisipasi politik konvensional.

2. Kerangka Teoritis

a. Teori Masyarakat Jaringan (Network Society) – Manuel Castells

Manuel Castells mengemukakan bahwa masyarakat kontemporer telah bertransformasi menjadi "masyarakat jaringan" (network society), dimana kekuasaan tidak lagi semata-mata terpusat pada institusi hierarkis, melainkan tersebar dalam jaringan komunikasi yang saling terhubung (Castells, 2009). Konsep "mass self-communication" yang diperkenalkan Castells relevan untuk menjelaskan bagaimana generasi muda memproduksi dan mendistribusikan pesan politik mereka sendiri secara massal melalui platform digital, tanpa bergantung pada gatekeeper media tradisional. Dalam konteks artikel ini, teori tersebut membantu menjelaskan mengapa proporsi generasi muda yang begitu besar dalam struktur pemilih (Katadata Media Network, 2024) dapat termobilisasi secara efektif melalui jaringan digital horizontal, alih-alih semata melalui struktur partai politik yang hierarkis.

b. Teori Ruang Publik (Public Sphere) – Jürgen Habermas

Konsep ruang publik yang dikemukakan Jürgen Habermas menggambarkan ruang deliberatif tempat warga negara dapat berdiskusi secara rasional dan kritis mengenai isu publik, terlepas dari kekuasaan negara maupun kepentingan pasar (Habermas, 1989). Media sosial, dalam batas tertentu, dapat dipandang sebagai perluasan kontemporer ruang publik tersebut, karena memungkinkan generasi muda mengartikulasikan opini secara lebih terbuka dan egaliter dibandingkan ruang publik konvensional yang cenderung didominasi elite. Namun, dominasi satu platform tertentu—sebagaimana ditunjukkan oleh data Instagram sebagai kanal informasi politik terbesar (Katadata Insight Center, 2023)—turut memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana ruang publik digital benar-benar plural, ataukah justru terpusat pada logika algoritmik satu platform yang dominan.

c. Teori Uses and Gratifications

Teori Uses and Gratifications menjelaskan bahwa khalayak bersifat aktif dalam memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti kebutuhan informasi, integrasi sosial, hiburan, maupun aktualisasi diri (Katz et al., 1973). Dalam konteks partisipasi politik digital, teori ini membantu menjelaskan mengapa generasi muda cenderung memilih platform tertentu untuk mengakses informasi politik. Data Katadata Insight Center yang menunjukkan preferensi kuat pada Instagram dibandingkan platform lain (Katadata Insight Center, 2023) dapat dibaca sebagai manifestasi kebutuhan gratifikasi visual dan naratif ringkas yang ditawarkan format konten Instagram, dibandingkan format teks (X) atau video panjang (YouTube).

Ketiga kerangka teoritis tersebut saling melengkapi: Network Society menjelaskan struktur jaringan yang memungkinkan mobilisasi horizontal generasi muda yang jumlahnya dominan secara

elektoral; Public Sphere menjelaskan fungsi normatif media sosial sebagai ruang deliberasi publik sekaligus potensi distorsinya akibat dominasi platform tertentu; dan Uses and Gratifications menjelaskan motivasi individual di balik pemilihan platform.

3. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejumlah penelitian terdahulu memperkuat landasan teoretis kajian ini. Penelitian mengenai model UTAUT termodifikasi menunjukkan bahwa penerimaan teknologi digital oleh Generasi Z dipengaruhi oleh faktor kemudahan penggunaan dan relevansi sosial, yang pada gilirannya memengaruhi partisipasi politik mereka (Amin et al., 2025). Kajian mengenai peran konten Instagram akun media daring dalam membentuk partisipasi politik digital Generasi Z turut menegaskan efektivitas platform visual dalam meningkatkan kesadaran politik generasi muda (Rini Rahyuni & Indra Lestari, 2026), sementara kajian mengenai peran X dalam menyalurkan suara politik Generasi Z menunjukkan bahwa platform berbasis teks tetap relevan untuk diskursus politik yang lebih argumentatif meskipun dengan basis pengguna yang lebih kecil (Ramadhina et al., 2025).

Dari sisi tantangan, kajian mengenai peran influencer dan iklan politik menunjukkan bahwa partisipasi politik digital Generasi Z semakin dipengaruhi oleh figur publik dan strategi komunikasi berbasis politainment (Azka Azaliyyah et al., 2026; Venus et al., 2025). Sementara itu, penelitian mengenai posisi Generasi Z "di antara idealisme dan pragmatisme politik" mengindikasikan adanya ambivalensi sikap politik generasi muda yang perlu dipahami secara mendalam (Salsabila et al., 2025). Kajian mengenai reactive-pragmatic activism turut menegaskan bahwa pola aktivisme digital Generasi Z Indonesia cenderung reaktif terhadap isu tertentu namun pragmatis dalam pilihan strategi aksi (Muchlis et al., 2026), sedangkan penelitian mengenai efektivitas komunikasi politik digital menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang tepat sasaran mampu meningkatkan partisipasi politik Generasi Z secara signifikan (Salim, 2025).

Secara umum, penelitian terdahulu telah memberikan fondasi empiris yang kuat mengenai hubungan media sosial dan partisipasi politik generasi muda, namun sebagian besar kajian tersebut belum mengaitkan secara eksplisit dominasi demografis generasi muda dalam struktur pemilih dengan data penetrasi digital dan preferensi platform secara terintegrasi.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Artikel ini disusun dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan menggambarkan dan menginterpretasikan suatu fenomena sosial-politik secara sistematis berdasarkan data yang telah tersedia, tanpa melakukan manipulasi atau pengujian hipotesis secara statistik-inferensial. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder sebagai basis utama kajian, yaitu dengan menelaah, mengategorikan, dan menginterpretasikan data yang telah dipublikasikan oleh lembaga resmi dan lembaga riset kredibel, kemudian menghubungkannya dengan temuan penelitian akademik terdahulu serta kerangka teoretis yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan kajian bersifat eksploratif-interpretatif, yakni memahami secara mendalam keterkaitan antara dominasi demografis generasi muda, pola penggunaan media digital, dan transformasi partisipasi politik, bukan menguji hubungan kausal antarvariabel.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam artikel ini bersumber dari empat rujukan utama yang saling melengkapi. Pertama, data Komisi Pemilihan Umum yang diolah oleh Katadata mengenai komposisi pemilih Pemilu 2024 berdasarkan generasi (Katadata Media Network, 2024). Kedua, data Open Data Jawa Barat mengenai proporsi suara Generasi Z dan Milenial pada Pemilu 2024 di tingkat provinsi (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2024). Ketiga, hasil survei APJII tahun 2024 mengenai jumlah dan komposisi pengguna internet Indonesia berdasarkan generasi (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024). Keempat, hasil survei Katadata Insight Center bulan Oktober 2023 mengenai platform media sosial yang digunakan anak muda untuk mengakses informasi politik (Katadata Insight Center, 2023). Keempat sumber data tersebut dilengkapi dengan penelaahan artikel jurnal ilmiah yang membahas partisipasi politik generasi muda dan media sosial di Indonesia guna memperkaya interpretasi data kuantitatif dengan konteks dan temuan kualitatif yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen resmi dan laporan lembaga riset yang dipublikasikan secara terbuka, dilengkapi dengan studi kepustakaan sistematis terhadap artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan tema partisipasi politik digital generasi muda. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) kualitatif, yaitu dengan mengategorikan keempat data sekunder tersebut ke dalam tema-tema besar yang saling berkaitan—meliputi tema dominasi demografis pemilih muda, lanskap penetrasi digital, dan preferensi platform untuk informasi politik—kemudian menginterpretasikan keterkaitan antartema dengan merujuk pada kerangka teoretis Network Society, Public Sphere, dan Uses and Gratifications. Proses analisis diarahkan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara ketiga jenis data tersebut, sehingga dapat dibangun narasi analitis yang koheren mengenai transformasi partisipasi politik Generasi Z dan Milenial Indonesia.

4. Keterbatasan Penelitian

Artikel ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, karena bersifat deskriptif-analitis dan mengandalkan data yang telah dipublikasikan oleh pihak lain, artikel ini tidak menghasilkan data primer baru dan bergantung pada validitas serta metodologi pengumpulan data pada sumber-sumber yang dirujuk. Kedua, data yang digunakan merupakan data pada titik waktu tertentu (2023–2024), sehingga dinamika perilaku digital generasi muda yang berubah cepat berpotensi mengalami pergeseran setelah periode tersebut. Ketiga, data penetrasi digital dan preferensi platform bersifat agregat nasional, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan variasi perilaku digital generasi muda di berbagai wilayah dan lapisan sosial-ekonomi Indonesia yang beragam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dominasi Demografis Pemilih Muda sebagai Basis Struktural Transformasi

Data Komisi Pemilihan Umum yang diolah Katadata menunjukkan bahwa Generasi Z dan Milenial secara kumulatif menyumbang 56% dari total pemilih nasional pada Pemilu 2024 (Katadata Media Network, 2024). Temuan ini bukan sekadar angka demografis, melainkan penanda struktural bahwa arah dan kualitas demokrasi elektoral Indonesia kini sangat bergantung pada preferensi dan perilaku politik generasi muda. Pola serupa terkonfirmasi pada level kewilayahan: data Open Data Jawa Barat mencatat bahwa Generasi Z dan Milenial menyumbang sekitar 55% suara di provinsi tersebut (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2024), yang menunjukkan bahwa dominasi ini bukan anomali nasional semata, melainkan pola yang konsisten hingga tingkat provinsi dengan populasi pemilih terbesar di Indonesia.

Kesamaan proporsi antara data nasional (56%) dan data Jawa Barat (55%) memperkuat argumen bahwa generasi muda kini menjadi kelompok penentu (decisive constituency) dalam kontestasi elektoral Indonesia di berbagai tingkatan. Dalam kerangka Network Society (Castells, 2009), dominasi numerik ini menjadi prasyarat struktural yang memungkinkan kekuatan jaringan digital generasi muda memiliki daya tawar politik riil—sebab jaringan horizontal yang dibangun melalui media sosial tidak akan memiliki konsekuensi elektoral yang signifikan apabila kelompok yang memproduksinya bukan kelompok pemilih mayoritas. Dengan kata lain, data ini menjelaskan mengapa partai politik dan kandidat pada Pemilu 2024 berlomba-lomba hadir di platform media sosial: bukan semata mengikuti tren, melainkan merespons realitas struktural bahwa mayoritas pemilih mereka adalah generasi yang hidupnya terhubung dengan ekosistem digital.

Temuan pada sub-bagian ini menjadi titik tolak penting untuk memahami mengapa transformasi partisipasi politik yang dibahas pada bagian kajian pustaka bukan sekadar fenomena kultural generasi muda semata, melainkan fenomena yang memiliki bobot elektoral nyata dan berimplikasi langsung terhadap arah kebijakan publik Indonesia ke depan.

2. Lanskap Digital Generasi Z: Menghubungkan Dominasi Elektoral dengan Penetrasi Internet

Jika data KPU dan Open Data Jawa Barat menjelaskan "siapa" yang mendominasi pemilih Indonesia, maka data APJII menjelaskan "di ruang mana" generasi tersebut paling banyak menghabiskan waktu dan berinteraksi dengan informasi. Survei APJII 2024 mencatat bahwa pengguna internet Indonesia telah mencapai 221,5 juta jiwa dengan tingkat penetrasi 79,5%, dimana

Generasi Z menjadi kelompok pengguna terbesar (34,40%), diikuti oleh Milenial (30,62%) (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024). Apabila kedua proporsi ini dijumlahkan, Generasi Z dan Milenial menyumbang lebih dari 65% populasi pengguna internet Indonesia—suatu proporsi yang sejalan dan bahkan melampaui proporsi dominasi mereka dalam struktur pemilih nasional (56%) maupun Jawa Barat (55%).

Keselarasan antara dominasi elektoral dan dominasi digital ini merupakan temuan kunci dalam kajian ini. Kelompok generasi yang secara struktural menentukan hasil pemilu adalah kelompok yang sama yang secara struktural mendominasi ruang digital Indonesia. Implikasinya, ruang digital bukan lagi sekadar kanal tambahan (supplementary channel) dalam komunikasi politik, melainkan telah menjadi arena utama (primary arena) dimana sosialisasi politik, pembentukan opini, dan mobilisasi elektoral berlangsung. Temuan ini memperkuat argumen dalam kajian mengenai dinamika partisipasi politik generasi muda dalam pemilu di era media sosial, yang menegaskan bahwa media sosial kini menggantikan sebagian peran forum tatap muka dan media cetak konvensional sebagai kanal utama sosialisasi pemilih pemula (Putra et al., 2025)

Dalam kerangka teori Uses and Gratifications (Katz et al., 1973), tingginya penetrasi internet pada Generasi Z dan Milenial dapat dipahami sebagai konsekuensi dari kesesuaian antara kebutuhan gratifikasi generasi ini—kebutuhan informasi cepat, koneksi sosial, aktualisasi diri, dan hiburan—dengan afordansi yang ditawarkan platform digital. Kesesuaian inilah yang pada gilirannya menjelaskan mengapa intensitas penggunaan media sosial terbukti berkorelasi positif dengan tingkat partisipasi politik generasi muda, sebagaimana ditemukan dalam berbagai kajian empiris (Nerista et al., 2025; Rohmah & Fatchuriza, 2025).

3. Instagram sebagai Kanal Dominan: Implikasinya terhadap Ruang Publik Digital

Data Katadata Insight Center Oktober 2023 memberikan gambaran lebih spesifik mengenai platform mana yang paling banyak digunakan anak muda untuk mengakses informasi politik: Instagram menempati posisi teratas dengan 66,2%, diikuti YouTube (40,8%), Facebook (38,1%), TikTok (33,8%), dan X/Twitter (30,2%) (Katadata Insight Center, 2023). Dominasi Instagram yang signifikan—hampir dua kali lipat dibandingkan TikTok dan lebih dari dua kali lipat dibandingkan X—merupakan temuan yang penting untuk dianalisis lebih lanjut, mengingat ketiga platform tersebut memiliki karakteristik afordansi yang berbeda.

Dibaca melalui teori Public Sphere (Habermas, 1989), temuan ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai kualitas ruang deliberasi publik digital Indonesia. Instagram, dengan format visual-naratif yang cenderung ringkas (foto, infografis, video pendek dalam format Stories atau Reels), secara struktural kurang mengakomodasi diskursus argumentatif yang mendalam dibandingkan platform berbasis teks seperti X. Dominasi platform visual ini sejalan dengan temuan mengenai efektivitas konten visual Instagram dalam membentuk kesadaran politik generasi muda (Rini Rahyuni & Indra Lestari, 2026), namun pada saat yang sama berpotensi mendorong konsumsi informasi politik yang bersifat permukaan (surface-level) alih-alih deliberasi substantif. Fenomena ini relevan dikaitkan dengan kekhawatiran mengenai kerentanan generasi muda terhadap misinformasi politik di era *post-truth* (Yanto & Irmala Sari, 2025), karena format konten yang ringkas dan cepat dikonsumsi cenderung mempersempit ruang verifikasi dan konteks yang memadai.

Di sisi lain, posisi X sebagai platform dengan proporsi pengguna terendah (30,2%) untuk informasi politik tidak serta-merta berarti platform tersebut tidak relevan. Kajian mengenai peran X dalam menyalurkan suara politik Generasi Z menunjukkan bahwa meskipun basis penggunanya lebih kecil, platform ini tetap menjadi ruang penting bagi diskursus politik yang lebih argumentatif dan real-time, khususnya pada momen krusial seperti debat kandidat (Ramadhina et al., 2025). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekosistem media sosial Indonesia untuk informasi politik bersifat terstratifikasi: Instagram mendominasi dari segi jangkauan dan volume konsumsi, sementara X berperan sebagai ruang deliberasi yang lebih mendalam meski dengan audiens yang lebih terbatas—suatu pembagian fungsi yang turut dijelaskan melalui variasi kebutuhan gratifikasi generasi muda dalam teori Uses and Gratifications.

4. Peluang: Perluasan Inklusivitas dan Personalisasi Partisipasi Politik

Integrasi ketiga rangkaian data di atas—dominasi elektoral, dominasi digital, dan preferensi platform—menunjukkan bahwa transformasi partisipasi politik generasi muda Indonesia membuka sejumlah peluang signifikan. Pertama, tingginya penetrasi internet dan dominasi generasi muda dalam struktur pemilih menciptakan potensi partisipasi politik yang lebih inklusif, karena generasi muda dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi kini memiliki akses yang relatif setara terhadap informasi politik melalui gawai mereka masing-masing, dibandingkan era ketika akses informasi politik sangat bergantung pada media cetak atau forum tatap muka yang terbatas secara geografis (Universitas Slamet Riyadi & Azizah, 2024).

Kedua, dominasi Instagram sebagai kanal informasi politik membuka peluang personalisasi partisipasi politik yang belum pernah terjadi pada era partisipasi konvensional. Generasi muda kini dapat mengikuti isu-isu spesifik yang relevan dengan identitas dan kepentingan personal mereka—seperti isu lingkungan, kesetaraan gender, atau hak digital—tanpa harus terikat pada afiliasi partai politik formal, sejalan dengan konsep partisipasi berbasis aktualisasi diri yang dijelaskan dalam kajian model UTAUT termodifikasi (Amin et al., 2025). Peluang ini juga terkonfirmasi oleh temuan mengenai peran dinamis generasi muda dalam mendorong partisipasi politik Indonesia, yang menunjukkan bahwa generasi muda semakin aktif menyuarakan isu-isu yang tidak selalu terwadahi secara memadai oleh struktur politik konvensional (Universitas Slamet Riyadi & Azizah, 2024).

Ketiga, kapasitas mobilisasi horizontal yang difasilitasi jaringan digital membuka peluang bagi generasi muda untuk mengorganisasi gerakan advokasi kebijakan secara lebih cepat dan efisien, sebagaimana ditunjukkan oleh gerakan #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw yang berhasil memobilisasi solidaritas kolektif berskala nasional dalam waktu relatif singkat (Wahyuningroem et al., 2024). Dalam kerangka Network Society, peluang ini menegaskan bahwa generasi muda kini memiliki kapasitas "mass self-communication" (Castells, 2009) yang memungkinkan mereka menjadi produsen wacana politik, bukan sekadar penerima pasif informasi dari media arus utama maupun elite politik.

5. Tantangan: Fragmentasi Wacana, Misinformasi, dan Partisipasi Simbolik

Di sisi lain, integrasi data juga mengungkap sejumlah tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian serius. Tantangan pertama adalah fragmentasi wacana publik akibat dominasi satu platform visual seperti Instagram. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, format konten yang ringkas dan cepat dikonsumsi berpotensi mempersempit ruang deliberasi rasional yang diidealkan dalam konsep Public Sphere (Habermas, 1989), sehingga wacana politik generasi muda berisiko terjebak pada level permukaan tanpa pemahaman kontekstual yang memadai. Tantangan ini diperparah oleh mekanisme algoritmik platform yang cenderung menampilkan konten sesuai preferensi pengguna, sehingga berpotensi menciptakan ruang gema (echo chamber) yang mempersempit eksposur generasi muda terhadap perspektif yang beragam (Khatimah et al., 2024).

Tantangan kedua adalah kerentanan terhadap misinformasi dan disinformasi politik. Tingginya intensitas konsumsi informasi politik melalui media sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh data APJII dan Katadata Insight Center, tidak serta-merta diikuti oleh kemampuan verifikasi informasi yang memadai di kalangan generasi muda, terutama pada era pasca-kebenaran di mana batas antara fakta dan opini semakin kabur (Yanto & Irmala Sari, 2025). Tantangan ini menjadi krusial mengingat besarnya proporsi generasi muda dalam struktur pemilih (56% secara nasional), yang berarti kerentanan terhadap misinformasi pada kelompok ini berpotensi memiliki konsekuensi elektoral yang signifikan bagi kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

Tantangan ketiga adalah kecenderungan partisipasi yang bersifat simbolik atau clicktivism, yaitu partisipasi politik berintensitas rendah—seperti menyukai atau membagikan ulang konten—tanpa disertai keterlibatan substantif dan berkelanjutan. Kajian mengenai posisi Generasi Z "di antara idealisme dan pragmatisme" menunjukkan bahwa sebagian generasi muda cenderung bersikap situasional dalam berpartisipasi, sehingga komitmen politik jangka panjang tidak selalu terjamin (Salsabila et al., 2025), sejalan dengan temuan mengenai pola reactive-pragmatic activism yang menggambarkan aktivisme digital Generasi Z Indonesia sebagai reaktif terhadap isu tertentu namun pragmatis dalam strategi aksinya (Muchlis et al., 2026).

Tantangan keempat berkaitan dengan dominasi konten politainment dan peran influencer dalam membentuk opini politik generasi muda, yang berpotensi mengaburkan batas antara partisipasi politik otentik dan strategi komunikasi politik yang dikendalikan oleh kepentingan tertentu (Azka Azaliyyah et al., 2026; Venus et al., 2025). Ketika kanal dominan seperti Instagram sangat memfasilitasi format konten yang mengutamakan estetika dan viralitas, risiko dangkalnya substansi wacana kebijakan yang dikonsumsi generasi muda menjadi semakin nyata.

Keempat tantangan ini menegaskan bahwa transformasi partisipasi politik generasi muda Indonesia bersifat ambivalen: dominasi demografis dan digital generasi muda memang membuka peluang perluasan dan personalisasi partisipasi politik sebagaimana dijelaskan melalui teori Network Society dan Uses and Gratifications, namun konsentrasi konsumsi informasi politik pada satu platform visual dominan turut menghadirkan risiko struktural terhadap kualitas ruang publik digital yang diidealkan dalam teori Public Sphere. Kedua sisi ini—peluang dan tantangan—perlu dipahami secara bersamaan agar transformasi partisipasi politik generasi muda dapat diarahkan menuju penguatan kualitas demokrasi, bukan sekadar peningkatan kuantitas interaksi digital semata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa transformasi partisipasi politik generasi muda Indonesia berakar pada tiga fenomena struktural yang saling terkait. Pertama, Generasi Z dan Milenial kini mendominasi struktur pemilih Indonesia, baik di tingkat nasional (56%) maupun di tingkat provinsi seperti Jawa Barat (55%), menjadikan mereka kelompok penentu utama dalam kontestasi elektoral. Kedua, dominasi elektoral tersebut berkelindan dengan dominasi digital, di mana Generasi Z dan Milenial juga menjadi kelompok pengguna internet terbesar di Indonesia dengan proporsi gabungan lebih dari 65% dari total 221,5 juta pengguna internet nasional. Ketiga, di antara berbagai platform media sosial, Instagram teridentifikasi sebagai kanal paling dominan dalam penyebaran informasi politik di kalangan anak muda, jauh mengungguli YouTube, Facebook, TikTok, dan X.

Keterkaitan ketiga temuan ini menegaskan bahwa media sosial—khususnya Instagram—telah bertransformasi menjadi arena utama sosialisasi dan mobilisasi politik generasi muda Indonesia, menggeser peran ruang publik konvensional yang sebelumnya didominasi forum tatap muka dan media cetak. Dibaca melalui kerangka Network Society, Public Sphere, dan Uses and Gratifications, transformasi ini membuka peluang perluasan inklusivitas, personalisasi partisipasi, dan kapasitas mobilisasi horizontal generasi muda yang belum pernah terjadi pada era partisipasi konvensional. Namun, transformasi yang sama juga menghadirkan tantangan struktural berupa fragmentasi wacana, kerentanan misinformasi, kecenderungan partisipasi simbolik, dan dominasi politainment yang berpotensi mendangkalkan substansi wacana politik generasi muda.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa locus partisipasi politik generasi muda Indonesia telah bergeser secara signifikan dari bilik suara konvensional menuju linimasa digital yang mereka huni setiap hari, tanpa menghilangkan signifikansi bilik suara itu sendiri sebagai muara akhir partisipasi elektoral. Pergeseran ini bersifat ambivalen dan menuntut respons kebijakan serta pendidikan yang mampu mengoptimalkan peluang sekaligus memitigasi tantangan yang menyertainya.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, kajian ini menegaskan relevansi kerangka Network Society, Public Sphere, dan Uses and Gratifications dalam menjelaskan transformasi partisipasi politik generasi muda non-Barat, khususnya Indonesia, sekaligus menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menerapkan konsep Public Sphere pada konteks dimana ruang publik digital cenderung terkonsentrasi pada satu platform dominan, alih-alih tersebar secara plural sebagaimana diidealkan dalam teori tersebut.

Secara praktis, temuan ini memiliki implikasi bagi tiga kelompok pemangku kepentingan. Bagi pembuat kebijakan, dominasi demografis dan digital generasi muda menegaskan urgensi merancang kanal komunikasi kebijakan publik yang secara khusus mengoptimalkan platform visual seperti Instagram, tanpa mengabaikan kebutuhan regulasi terhadap misinformasi politik di platform tersebut. Bagi penyelenggara pendidikan, temuan mengenai kerentanan generasi muda terhadap misinformasi menegaskan perlunya penguatan kurikulum literasi digital dan politik yang secara eksplisit membekali

keterampilan verifikasi informasi visual, mengingat karakteristik konten Instagram yang cenderung ringkas dan cepat dikonsumsi. Bagi partai politik dan lembaga demokrasi, temuan mengenai kecenderungan partisipasi simbolik menegaskan perlunya strategi komunikasi politik yang lebih otentik dan substantif, guna mengonversi tingginya volume interaksi digital generasi muda menjadi keterlibatan politik yang bermakna dan berkelanjutan.

Saran

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian empiris berbasis data primer guna menguji dan memperdalam temuan deskriptif-analitis dalam artikel ini, khususnya untuk mengukur secara lebih presisi hubungan antara preferensi platform tertentu dengan kualitas partisipasi politik substantif generasi muda, serta mengeksplorasi variasi perilaku digital generasi muda berdasarkan konteks demografis dan geografis yang lebih beragam di luar Jawa Barat.

Bagi pembuat kebijakan, disarankan untuk merumuskan strategi komunikasi kebijakan publik yang mempertimbangkan dominasi Instagram sebagai kanal informasi politik generasi muda, disertai kerangka regulasi yang menangani penyebaran misinformasi politik secara proporsional tanpa mengekang kebebasan berekspresi digital. Bagi dunia pendidikan, disarankan untuk mengintegrasikan literasi politik digital ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan pada jenjang menengah dan tinggi, dengan penekanan khusus pada keterampilan kritis dalam mengonsumsi konten visual bermuatan politik, sehingga generasi muda dapat memanfaatkan posisi struktural mereka sebagai kelompok pemilih dan pengguna digital terbesar Indonesia secara optimal bagi penguatan kualitas demokrasi ke depan.

REFERENCES

Amin, M., Ritonga, A. D., Situmorang, T. P., & Santoso, A. D. (2025). Revolutionizing political participation: A modified UTAUT model for generation Z in the digital era. *Frontiers in Political Science*, *7*, 1681050. https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1681050

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *APJII: Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang.* https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang

Azka Azaliyyah, Dio Apache Gonzales, & Amir, A. S. (2026). Politainment Sebagai Strategi Komunikasi Politik: Analisis Peran Influencer Dalam Pembentukan Opini Gen Z. *KOMVERSAL*, *8*(1), 208–222. https://doi.org/10.38204/komversal.v8i1.2728

Castells, M. (2009). *Communication Power*. Oxford University Press.

Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.

Harsono, H. (2023). Politik Identitas Dan Partisipasi Politik Di Media Sosial: Analisis Model Struktural Pada Generasi Z Di Kota Malang. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, *4*(2), 166–187. https://doi.org/10.46874/tkp.v4i2.752

Judijanto, L., Wandan, H., Ayu, N., Triyantoro, A., & Suroso, S. (2024). Pengaruh Politik Identitas dan Penggunaan Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Digital Pemilih Milenial dan Gen Z di Indonesia. *Sanskara Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *2*(01), 24–35. https://doi.org/10.58812/sish.v2i01.500

Katadata Insight Center. (2023). *Ini media sosial yang dipakai anak muda untuk akses informasi politik.* https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/7374885aba94635/ini-media-sosial-yang-dipakai-anak-muda-untuk-akses-informasi-politik

Katadata Media Network. (2024). *KPU: Pemilih Pemilu 2024 didominasi oleh kelompok Gen Z dan Milenial.* https://databoks.katadata.co.id/pasar/statistik/faf64350269d0c8/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial

Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1973). Uses and Gratifications Research. *Public Opinion Quarterly*, *37*(4), 509. https://doi.org/10.1086/268109

Khatimah, K., Alhamdani, Vega Selvia, Anita Sugiyarti, Muhammad Gilang Maulana, & Muhammad Luthfi Setiarno Putra. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik dan

Demokrasi di Indonesia. *Vox Populi*, *7*(2), 128–143. https://doi.org/10.24252/vp.v7i2.52688

Muchlis, C. D., Ihsan, A. B., Ansori, M. H., & Wekke, I. S. (2026). Reactive-pragmatic activism: The trend and pattern of Indonesia's Generation Z digital movement. *Simulacra*, *9*(1), 103–118. https://doi.org/10.21107/sml.v9i1.33629

Nerista, A. N., Mahardhani, A. J., & Sulton. (2025). The Effect Of Social Media Platform Use Intensity On Students' Digital Political Participation. *Jhss (Journal Of Humanities and Social Studies)*, *9*(3), 252–258. https://doi.org/10.33751/jhss.v9i3.85

Nugroho, B. H. (2025). Digital activism and youth participation in Indonesia: A qualitative study of social media's role in contemporary social movements. *Priviet Social Sciences Journal*, *5*(10), 91–105. https://doi.org/10.55942/pssj.v5i10.603

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2024). *Pemilu 2024: Gen Z dan Milenial sumbang 55 persen suara, ini fakta lengkapnya*. https://opendata.jabarprov.go.id/en/article/pemilu-2024-gen-z-dan-milenial-sumbang-55-persen-suara-ini-fakta-lengkapnya

Putra, A., Asrul, A., Rajab, M., & Nur, L. O. M. A. (2025). Dinamika Partisipasi Politik Generasi Muda dalam Pemilu di Era Media Sosial. *Portal Riset Dan Inovasi Sistem Perangkat Lunak*, *3*(3), 125–130. https://doi.org/10.59696/prinsip.v3i3.165

Ramadhina, A. M. S., Fuady, I., & Wibowo, K. A. (2025). Political Voice of Gen Z and the Power of Social Media X in 2024. *JRP (Jurnal Review Politik)*, *15*(1), 105–121. https://doi.org/10.15642/jrp.2025.15.1.105-121

Rini Rahyuni & Indra Lestari. (2026). Pengaruh Konten Media Instagram @tempodotco terhadap Partisipasi Politik Digital Gen Z di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, *6*(1), 176–186. https://doi.org/10.55606/juitik.v6i1.2007

Rohmah, S., & Fatchuriza, M. (2025). The Influence of Social Media Usage Intensity on Student Political Participation in the 2024 Election. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *5*(2), 239–248. https://doi.org/10.30742/juispol.v5i2.4799

Salim, S. A. (2025). The Effectiveness of Digital Political Communication in Increasing Generation Z Political Participation in Indonesia. *International Journal of Education, Culture, and Society*, *3*(3), 962–979. https://doi.org/10.58578/ijecs.v3i3.7531

Salsabila, S., Chaniago, D. S., & Hilmi, F. (2025). GEN Z IN TRANSITION: BETWEEN IDEALISM AND PRAGMATISM IN POLITICS. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, *7*(2), 209–221. https://doi.org/10.24076/feyj4k42

Universitas Slamet Riyadi, & Azizah, N. (2024). Peran Dinamis Generasi Muda Dalam Mendorong Partisipasi Politik di Indonesia. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, *7*(2), 90–106. https://doi.org/10.32699/resolusi.v7i2.8239

Venus, A., Intyaswati, D., Ayuningtyas, F., & Lestari, P. (2025). Political participation in the digital age: Impact of influencers and advertising on Generation Z. *Cogent Arts & Humanities*, *12*(1), 2520063. https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2520063

Wahyuningroem, S. L., Sirait, R., Uljanatunnisa, U., & Heryadi, D. (2024). Youth political participation and digital movement in Indonesia: The case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw. *F1000Research*, *12*, 543. https://doi.org/10.12688/f1000research.122669.3

Yanto, S., & Irmala Sari, P. (2025). Analisis Dampak Media Sosial terhadap Literasi Politik dan Partisipasi Demokratis Generasi Z di Era Post-Truth: Analisis Dampak Media Sosial terhadap Literasi Politik dan Partisipasi Demokratis Generasi Z di Era Post-Truth. *Civic Education Perspective Journal*, *5*(2), 67–76. https://doi.org/10.22437/cepj.v5i2.41641